

# PEMAHAMAN PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI AISYIYAH CABANG KESAMBEN, BLITAR

Nathasya Aditya Wardiana  
Sawitri Dwi Prastiti

Universitas Negeri Malang  
nath.thiea@gmail.com

**Abstract:** : *The aim of this study is to define the treasurer understanding regarding transparency principle, accountability, and internal control in financial management. The data is collected by conducting in depth interview for primary data and reviewing other related data. The results of this study show that (1) transparency principle of financial management in Aisyiyah at Kesamben Branch is shown in financial recording and reporting phase; (2) accountability principle of financial management in Aisyiyah at Kesamben Branch is reflected as intrinsic motivation in vertical and horizontal accountability; yet (3) Aisyiyah at Kesamben Branch has not carried out the function of internal control in financial management which is reflected from the existence of dual function in institution and school with no authority.*

**Keywords:** *transparency, accountability, internal control, financial management*

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dalam operasinya tidak berorientasi untuk menghasilkan laba. Persyarikatan Muhammadiyah adalah salah satu contoh organisasi keagamaan yang bersifat sosial serta tidak bertujuan untuk memupuk kekayaan bagi para anggotanya. Dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/2742/POLPUM perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, menjelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum sehingga tidak perlu mendaftarkan ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah begitu juga dengan amal usaha dan organisasi otonom yang berada di bawah struktur organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Aisyiyah adalah sebuah gerakan

perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah itu sendiri.

Berdasarkan status badan hukum yang melekat pada Aisyiyah, maka organisasi seharusnya berpedoman pada PSAK Nomor 45 dalam menyusun laporan keuangannya. Jika organisasi nirlaba telah patuh pada PSAK Nomor 45, maka transparansi dan akuntabilitasnya juga akan semakin tinggi. Transparansi dan akuntabilitas nantinya akan meningkatkan kualitas *Good Governance* yang akan menghasilkan output berupa pelayanan publik yang berkualitas. Dengan transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan dapat menciptakan pelayanan kepada publik yang optimal dan berkualitas yang mengacu pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Elder,

et.al (2010:18) mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan manajemen dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Aisyiyah cabang Kesamben merupakan salah satu organisasi yang mengalami kemajuan pesat, hasil yang nyata dari kemajuan tersebut adalah berdirinya TPA dan TK ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal) Kesamben. Aisyiyah cabang Kesamben berdiri pada 23 April 2006, namun pendirian organisasi tersebut baru disahkan oleh pimpinan wilayah Aisyiah Jawa Timur pada 2 Juli 2007 dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Organisasi dengan Nomor 108/SK-PWA/A/VII/2007. Namun Pada kenyataannya, bendahara (Ibu SM) mengaku baru membuat laporan keuangan pada bulan Januari 2007, padahal sudah hampir satu tahun sejak organisasi tersebut berdiri, selain itu laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara masih menggunakan format yang tradisional.

Hetifa mendefinisikan (2003:2) *governance* sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Menurut Sedarmayati (2009:76) *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agent of chance*) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam *good governance* tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu (a) Partisipasi, (b) Penegakan hukum, (c) Transparansi, (d) Responsifitas, (e) Konsensus orientasi, (f) Kesetaraan dan keadilan, (g) Efektif dan efisiensi, (h) Akuntabilitas dan (i) Strategi visi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002), menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Andrianto (2007:20) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui (a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, (b) Kejelasan dan kelengkapan informasi, (c) Keterbukaan proses dan (d) Kerangkaregulasi yang menjamin transparansi.

Transparansi juga menyangkut pencatatan dan pelaporan catatan keuangan. Bastian (2010:56) menyebutkan bahwa siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan. Tahap pencatatan bukti transaksi keuangan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah-bukukan atau posting dari jurnal umum berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam menyampaikan informasi pada publik menurut Bastian (2010:78) ada 3 yakni: publikasi, presentasi dan pengiriman surat. Publikasi merupakan pengumuman yang diperuntukkan bagi publik atau umum, biasanya diterapkan dalam bentuk gambar, teks, atau konten audio visual lain. Sedangkan presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin yang merupakan salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan topik, pendapat atau informasi kepada orang lain.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011: 89). Selanjutnya, menurut Sedarmayanti (2009:14), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Menurut Mardiasmo (2009:21), akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu :

#### 1. Akuntabilitas vertikal (internal)

Setiap pejabat atau petugas publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban

untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan.

## 2. Akuntabilitas horizontal (eksternal)

Akuntabilitas horizontal (eksternal) melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya (*public or external accountability and environment*).

Motivasi diri juga dapat menunjang akuntabilitas seseorang. Menurut Bahri (2002:115) motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sumarni (2005:23) menyebutkan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang.

Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi bagi para pemakainya baik sebagai pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Agoes (2008:79) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal mencakup rencana organisasi serta metode-metode terkait dan pengukuran yang diadopsi perusahaan untuk melindungi aset dari pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan oleh karyawan serta meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi (Weygandt et al, 2007:454). Menurut Horngren dan Harrison (2007:295) ada beberapa proses pengawasan terhadap sistem informasi yaitu : (a) Otorisasi, (b) Pemisahan tugas, (c) Supervisi atau pengawasan, (d) Catatan akuntansi, (e) Pengendalian akses dan (f) Verifikasi independen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena dianggap sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin menggambarkan secara terperinci menurut pandangan narasumber mengenai penerapan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada organisasi yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah penggambaran arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan tindakan sosial masyarakat sebagai sesuatu yang bermakna serta dapat merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial (Sugiyono, 2009:79).

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada organisasi Aisyiyah cabang Kesamben yang berada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh peneliti dan menggunakan alat bantu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan pada empat orang bendahara yaitu:

1. Siti Maisunah (SM) selaku bendahara Aisyiyah yang memegang uang dari kegiatan organisasi dan juga koperasi simpan pinjam sekaligus Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kesamben
2. Eni Budi Setyowati (EB) selaku bendahara sekolah yang berada di bawah naungan Majelis Dikdasmen dan juga sebagai tenaga pengajar di TK tersebut.
3. Basriatin (BA) selaku bendahara TPA (Tempat Penitipan Anak) dan juga sebagai tenaga pengajar di TK tersebut.
4. Ana Wiji (AW) selaku bendahara koperasi sekolah dan juga sebagai tenaga pengajar di TK tersebut serta merangkap sebagai sekretaris organisasi.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data lain yang relevan dari organisasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi dari data dokumentasi, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan apa yang dikatakan pihak umum

dengan asumsi pribadi peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Profil Aisyiyah Cabang Kesamben, Blitar**

Aisyiyah Cabang Kesamben berdiri pada 23 April 2006, namun pendirian organisasi tersebut baru disahkan oleh pimpinan wilayah Aisyiah Jawa Timur pada 2 Juli 2007. Bukti pengesahan tersebut adalah dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Organisasi dengan Nomor 108/SK-PWA/A/VII/2007. Dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas Aisyiyah berasal dari setoran amal usaha yang dimiliki serta iuran sukarela dari para anggota. Aisyiyah Cabang Kesamben sendiri memiliki amal usaha yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang memiliki sebuah sekolah TK yang bernama TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kesamben. Seiring dengan perkembangan sekolah yang semakin maju, dibentuk pula tempat penitipan anak (TPA) yang diperuntukkan bagi para orang tua yang ingin menitipkan anak karena kesibukannya dalam pekerjaan. Selain itu, Aisyiyah juga memiliki seorang donatur tetap. Dana dari donatur tersebutlah yang digunakan untuk menggaji para pengajar disana.

### **Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat bendahara yang ada di Aisyiyah ditemukan adanya kesamaan, bahwa terdapat beberapa hal yang timbul mengenai transparansi pengelolaan keuangan di Aisyiyah, seperti :

#### **Pencatatan Keuangan**

Menurut hasil wawancara, seluruh bendahara mengaku sudah membuat catatan keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Catatan tersebut dijadikan sebagai media untuk menginformasikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Namun terdapat masalah mengenai periode pencatatan tersebut. Bendahara Aisyiyah menjelaskan bahwa bendahara yang terdahulu membuat catatan keuangan setelah satu tahun berdiri. Hal tersebut terjadi karena bendahara terdahulu menganggap bahwa jumlah uang kas yang digunakan dalam kegiatan Aisyiyah pada awal berdirinya terlalu kecil sehingga tidak perlu untuk dicatat.

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap para bendahara, diketahui bahwa para bendahara sudah berusaha memenuhi prinsip transparansi yaitu ketersediaan informasi. Para bendahara memiliki buku catatan yang berisi mengenai informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik kepentingan. Catatan keuangan tersebut berisi pengeluaran dan pendapatan yang ada dalam organisasi, sehingga dapat dipastikan pembukuan yang digunakan oleh semua bendahara hanya berupa laporan arus kas yang berisi jumlah uang kas masuk dan keluar. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan yang sangat nampak, jika dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, mewajibkan entitas nirlaba membuat empat jenis laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, namun dalam praktiknya para bendahara hanya membuat satu jenis laporan keuangan. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan para pemilik kepentingan yang hanya membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan berupa uang kas yang ada dalam organisasi.

Selanjutnya, tidak ditemukan catatan keuangan pada saat awal pendirian Aisyiyah karena bendahara terdahulu menganggap jumlah uang kas yang ada terlalu kecil sehingga tidak perlu dicatat. Bendahara Aisyiyah juga menjelaskan bahwa bendahara terdahulu membuat catatan keuangan setelah hampir satu tahun setelah organisasi berdiri. Sedangkan dalam akuntansi, periode pencatatan keuangan harus dilakukan secara periodik pada saat adanya transaksi pertama kali suatu entitas dibentuk. Pencatatan secara periodik dilakukan untuk mengetahui status dan kondisi keuangan pada saat itu, dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan masalah mengenai ketidak-jelasan kondisi keuangan pada waktu satu tahun tersebut.

Selain itu, pencatatan menurut para bendahara adalah proses menulis kembali bukti-bukti transaksi ke dalam sebuah buku yang berisi catatan tentang pendapatan dan pengeluaran dalam organisasi. Sedangkan Bastian (2010:76) menyebutkan bahwa tahap pencatatan bukti transaksi keuangan adalah suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti atas suatu transaksi yang telah disetujui dan disusun ke dalam buku harian atau jurnal umum, memindah-bukukan atau posting dari jurnal umum berdasarkan kelompok akun atau jenisnya ke dalam akun buku

besar. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan dalam hal pemberian makna pencatatan. Namun pada kenyataannya, bendahara hanya sebatas mengumpulkan dan mencatat kembali bukti transaksi dalam sebuah buku, tanpa membuat jurnal umum.

### **Pelaporan Keuangan**

Para bendahara menggunakan teknik presentasi dalam menginformasikan keuangan dalam memenuhi tugasnya. Bendahara menyatakan bahwa memiliki buku yang berisi catatan mengenai kondisi keuangan. Dengan demikian bendahara sudah memenuhi prinsip transparansi dengan memberikan informasi melalui catatan tersebut yang nantinya disampaikan secara lisan dalam pertemuan dengan donatur dan wali murid. Sedangkan pelaporan menggunakan tulisan ditandai dengan penyerahan catatan tersebut kepada otoritas yang berada di atasnya. Bendahara TK, TPA dan koperasi siswa menyerahkan catatan yang dipegang masing-masing kepada Kepala Sekolah.

### **Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan**

Hasil wawancara menjelaskan bahwa para bendahara sudah memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntabilitas. Hal tersebut tercermin dari informasi yang disampaikan bahwa para bendahara sudah memiliki kesadaran serta tanggungjawab terhadap tugas dan wewenangnya masing-masing. Adapun informasi yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **Motivasi Intrinsik**

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa seluruh bendahara sudah memiliki motivasi di dalam diri masing-masing untuk melakukan pencatatan keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara para bendahara dengan anggota organisasi lain dan pihak luar, yang dalam hal ini wali murid dan donatur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bendahara sudah memiliki motivasi tinggi untuk membuat catatan keuangan, hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas secara horisontal, yaitu pertanggungjawaban pada masyarakat.

Sesuai dengan konsep motivasi, bendahara sudah memiliki niat dalam diri yang mendorong untuk

berperilaku sesuai dengan perintah yang bertujuan untuk memberikan informasi. Sedangkan media dalam penyampaian informasi tersebut berupa catatan keuangan organisasi. Terdapat kesamaan niat dalam diri seluruh bendahara bahwa ada keyakinan dan dorongan untuk membuat catatan keuangan tersebut. Dorongan tersebut tercipta karena ingin menumbuhkan kepercayaan antar bendahara maupun dengan pihak luar, yaitu donatur dan wali murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh bendahara membuat catatan sebagai sarana pertanggungjawaban agar seluruh pihak mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya dan tidak menjadi fitnah.

#### **Akuntabilitas Vertikal**

Akuntabilitas vertikal dalam organisasi adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, dalam hal ini para bendahara Sekolah, TPA dan bendahara Koperasi Siswa memberikan pertanggungjawaban kepada Kepala Sekolah. Hal tersebut ditandai dengan adanya catatan keuangan yang diinformasikan kepada Kepala Sekolah setiap akhir tahun, catatan tersebut yang nantinya digunakan untuk menginformasikan kepada wali murid saat diadakan pertemuan. Selain itu, akuntabilitas vertikal lain, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bentuk akuntabilitas vertikal dalam mengelola keuangan organisasi dan sekolah adalah dengan bertindak jujur dan penuh dengan tanggungjawab. Semua bendahara sudah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut ditandai dengan keyakinan para bendahara yang bersandar pada kepercayaan terhadap Tuhan dan berkeyakinan bahwa segala sesuatu akan ada balasan dari Tuhan, sehingga beliau takut berdosa jika melakukan kecurangan.

Berdasarkan konsep akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau yang dapat dilihat oleh manusia. Melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan untuk mengelola keuangan dengan segenap hati dan penuh tanggungjawab merupakan bentuk akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh bendahara Aisyiyah dan sekolah. Sedangkan seluruh bendahara mengaku bahwa membuat catatan keuangan tersebut didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan, yang selanjutnya mendorong terciptanya akuntabilitas vertikal tersebut.

## **Akuntabilitas Horisontal**

Berdasarkan kutipan wawancara, diperoleh informasi bahwa semua bendahara sudah menunjukkan akuntabilitasnya dengan cara memberikan pertanggungjawaban kepada para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Cara tersebut adalah dengan penginformasian catatan keuangan pada donatur yang dilakukan sebulan sekali, yaitu pada saat diadakan pertemuan anggota organisasi pada minggu kedua tiap bulan. Sedangkan penginformasian pada para wali murid diadakan setiap satu semester sekali saat diadakan pertemuan saat pengambilan raport. Bendahara memaknai akuntabilitas keuangan sebagai bentuk penyampaian bendahara kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas menurut bendahara merupakan media komunikasi bendahara kepada anggota mengenai kondisi keuangan organisasi. Melalui catatan yang merupakan bentuk akuntabilitas keuangan, para pemilik kepentingan dapat mengetahui kondisi keuangan organisasi setiap bulan. Sedangkan wali murid, dapat mengetahui kondisi keuangan sekolah pada saat diadakan rapat setiap semester.

Pemaknaan akuntabilitas keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan para bendahara untuk menghindarkan masyarakat dari pikiran negatif dan menyampaikan kepada para pemilik kepentingan bahwa uang kas dalam organisasi dan sekolah digunakan untuk keperluan yang semestinya dan bukan untuk keperluan pribadi para bendahara. Selain itu akuntabilitas melalui catatan keuangan merupakan media penghubung bendahara kepada para pemilik kepentingan mengenai kondisi keuangan saat ini, baik buruk kondisi keuangan, atau ada ataupun tidak adanya uang kas saat ini.

## **Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Keuangan**

### **Terdapat Perangkapan Fungsi Dalam Organisasi dan Sekolah**

Pada dasarnya, para bendahara sadar akan tugas masing-masing, walaupun tidak ada peraturan ataupun *job description*, namun ada uraian tugas bagi masing-masing bendahara. Pemahaman terhadap tugas masing-masing bendahara tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian internal. Dalam hasil wawancara menunjukkan

bahwa terdapat perangkapan fungsi dalam organisasi maupun dalam sekolah. Bahkan saat awal pendirian sekolah, kepala sekolah merangkap sebagai bendahara sekolah, sekaligus yang bertugas memegang uang.

Berdasarkan jawaban dari para bendahara dalam hasil wawancara, terdapat informasi bahwa pada awal pendirian sekolah terdapat perangkapan fungsi dalam sekolah, yaitu Kepala Sekolah merangkap menjadi bendahara sekolah sekaligus sebagai pemegang uang dalam sekolah. Namun, setelah Kepala Sekolah diganti, Kepala Sekolah yang baru juga merangkap sebagai bendahara Aisyiyah yang memegang uang kas dalam organisasi serta memegang keuangan dari hasil koperasi simpan pinjam yang berada dalam lingkup Aisyiyah. Perangkapan fungsi yang lain adalah bendahara Koperasi siswa yang merangkap sebagai sekretaris dalam organisasi.

### **Tidak Ada Otorisasi**

Menurut hasil wawancara, dalam organisasi belum ada otorisasi yang jelas. Oleh karena itu terdapat perangkapan fungsi Kepala Sekolah sekaligus bendahara Aisyiyah. Hal tersebut mungkin terjadi karena sekolah merupakan wakaf atau dapat dikatakan sebagai warisan dari keluarga Kepala Sekolah. Selain itu, para bendahara diberi kuasa untuk mencatat dan sekaligus memegang uang. Berdasarkan konsep pengendalian internal, pemberian kuasa untuk mencatat dan memegang uang adalah hal yang harus dihindari. Dengan demikian, berarti harus ada pemisahan fungsi antara orang yang mencatat kas dengan yang memegang kas. Oleh karena itu, dalam Aisyiyah harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Setiap pengeluaran yang terjadi dalam organisasi dan sekolah pun harus seizin donatur. Karena sekolah adalah pemberian, maka donatur berhak tahu segala kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Pada kenyataannya kepala sekolah belum sepenuhnya melakukan hal tersebut. Bendahara Aisyiyah sekaligus kepala sekolah mengaku bahwa memusyawarahkan pada donatur dan anggota organisasi yang lain mengenai kebijakan kenaikan gaji, sedangkan untuk kepentingan sekolah seperti pembangunan sekolah menjadi wewenang beliau tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu pada anggota yang lain. Seharusnya setiap kebijakan baru

yang akan dijalankan oleh sekolahpun, sebelumnya juga harus dimusyawarahkan dengan pihak organisasi terlebih dahulu.

### **Kedudukan Aisyiyah di Bawah Naungan Muhammadiyah**

Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Setelah kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini Aisyiyah telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat Kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat Kelurahan). Kedudukan Aisyiyah dijelaskan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 22/KEP/I.0/B/2009 tentang Penetapan Aisyiyah Sebagai Organisasi Otonom Khusus. Organisasi otonom Muhammadiyah ialah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui SK tersebut menjelaskan bahwa memberikan wewenang kepada Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung hasil wawancara dan data yang dikemukakan sebelumnya, diperoleh informasi mengenai pemahaman bendahara terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

### **Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben tersaji

dalam tahap pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan. Transparansi khusus yang melekat pada organisasi ditandai dengan aktivitas pelaporan keuangan, bendahara sudah memenuhi prinsip transparansi dengan menjamin kemudahan untuk mengakses informasi keuangan serta telah berusaha memberikan informasi catatan keuangan kepada para pemilik kepentingan dalam organisasi dan sekolah. Sedangkan dalam proses pencatatan keuangan, para bendahara sebatas mencatat kembali bukti transaksi tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

### **Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan**

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben tercermin dalam beberapa hal, seperti dengan adanya motivasi intrinsik, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Seluruh bendahara sudah memiliki motivasi yang mendasari untuk melakukan pencatatan agar menumbuhkan rasa saling percaya. Akuntabilitas vertikal dan horisontal ditandai dengan adanya pengelolaan keuangan organisasi dan sekolah yang bertanggungjawab dan jujur sesuai dengan amanah yang diberikan. Pemahaman bendahara mengenai akuntabilitas sudah memadai, hal tersebut didukung oleh keyakinan mengenai akuntabilitas vertikal yang cukup. Aisyiyah merupakan organisasi yang memiliki latar belakang keagamaan sehingga, pertanggungjawaban kepada Tuhan sangat diperhatikan untuk menghindari dosa jika melakukan sebuah kecurangan.

### **Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Keuangan**

Pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan di Aisyiyah cabang Kesamben belum sepenuhnya dijalankan, hal tersebut tercermin dengan masih terdapat perangkapan fungsi dalam organisasi dan sekolah serta tidak ada otorisasi di dalamnya. Perangkapan fungsi dalam organisasi dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan yang sulit dideteksi. Selain itu, otorisasi juga diperlukan agar setiap bendahara mengerti akan wewenang masing-masing sehingga meminimalkan kesalahan dalam menjalankan tugas. Meskipun demikian, sekolah merupakan warisan keluarga sehingga pengendalian internal di dalamnya tidak terlalu tegas dan lebih condong kepada hubungan kekerabatan. Hal tersebut menyebabkan seluruh bendahara melakukan tugasnya dengan baik walaupun tanpa

diawasi karena adanya dominasi budaya sungkan terhadap Kepala Sekolah yang merupakan cucu pemilik sekolah.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian mengenai pemahaman transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

### **Untuk Aisyiyah**

Aisyiyah diharapkan membuat kebijakan mengenai format pencatatan keuangannya dan mempublikasikan catatan keuangan yang telah dibuat sebagai bentuk formal dari pertanggungjawaban kepada para donatur dan anggota. Selain itu, mengingat Aisyiyah adalah organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah, maka dianjurkan Aisyiyah merujuk pada PSAK Nomor 45 sebagai pedoman dalam penulisan laporan keuangannya, karena Muhammadiyah adalah organisasi yang telah memiliki legalitas badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Bendahara organisasi maupun sekolah juga diharapkan dapat mempertahankan sikap yang jujur dan amanah sebagai bentuk dari pertanggung-jawaban atas kinerja yang menjadi tugasnya. Selanjutnya, pengendalian internal dalam organisasi perlu dilakukan sebagai wujud meminimalkan kecurangan.

### **Untuk Calon Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini terbatas pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan bagi para calon peneliti selanjutnya untuk lebih memperkaya bacaan terkait teori *Good Governanvce* dan dapat menggunakan lebih banyak prinsip dalam teori tersebut di dalam penelitiannya. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya memilih organisasi maupun yayasan yang sudah memiliki standar formal dalam penulisan laporan keuangannya.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Hetifa, S. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Andrianto, N. 2007. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Goverment*. Palangkaraya: Bayu Media.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. 2008. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Bahri, S. D. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumarni, S. 2005. *Motivasi Belajar*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Agoes, S. 2008. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.